



RENJA

RENCANA KERJA



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email satpolpp@kapuashulukab.go.id
PUTUSSIBAU 78711

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan berkat dan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2020 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016– 2021 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Putussibau, Juni 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	3
BAB II.....	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH....	9
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	10
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	16
BAB III	19
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	19
3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	20
BAB IV	30
PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD 6

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD..... 7

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 11

Tabel 2. 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiata SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 17

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2020 21

Tabel 3. 2 Program/ Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2020 23

Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

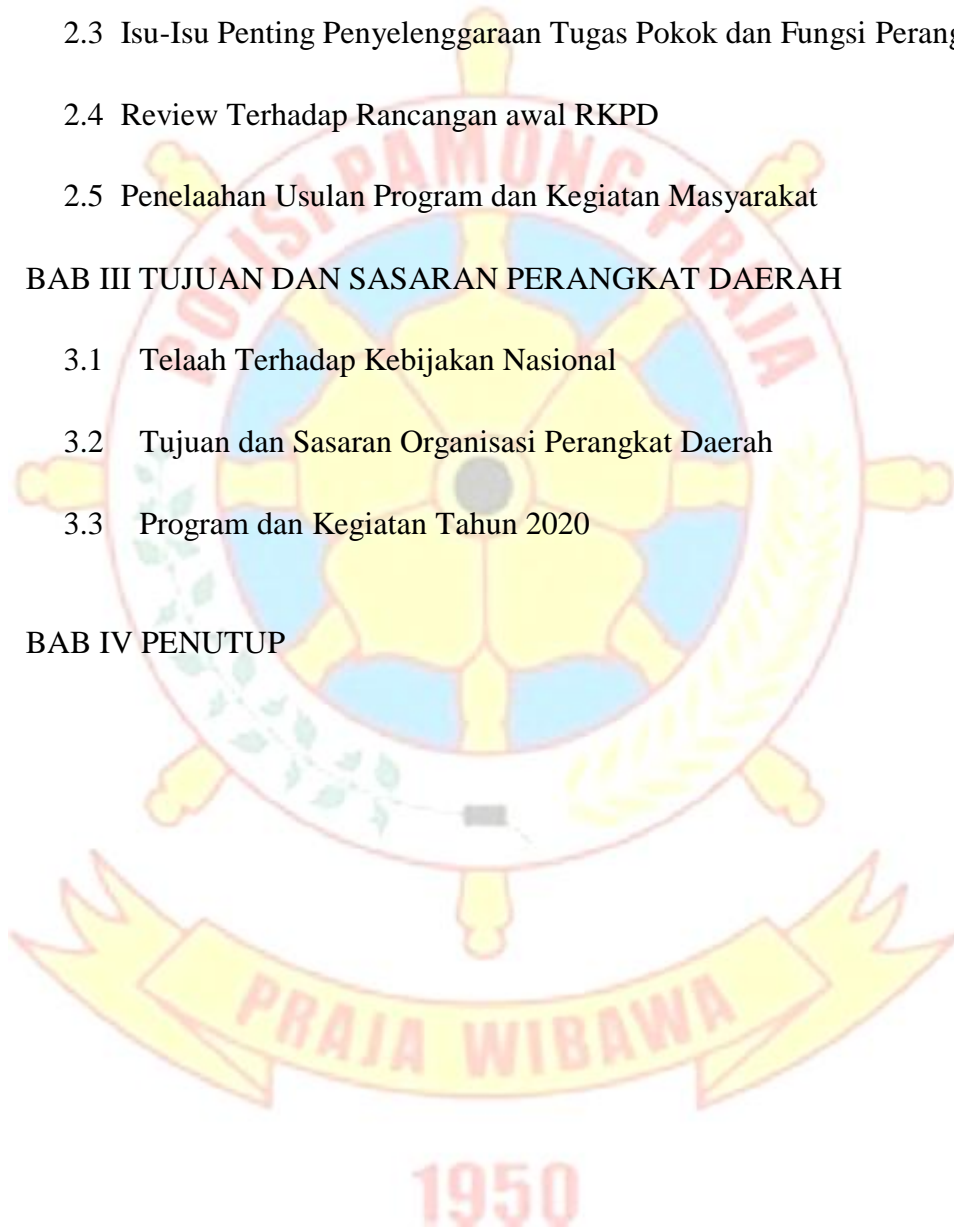
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2020

BAB IV PENUTUP



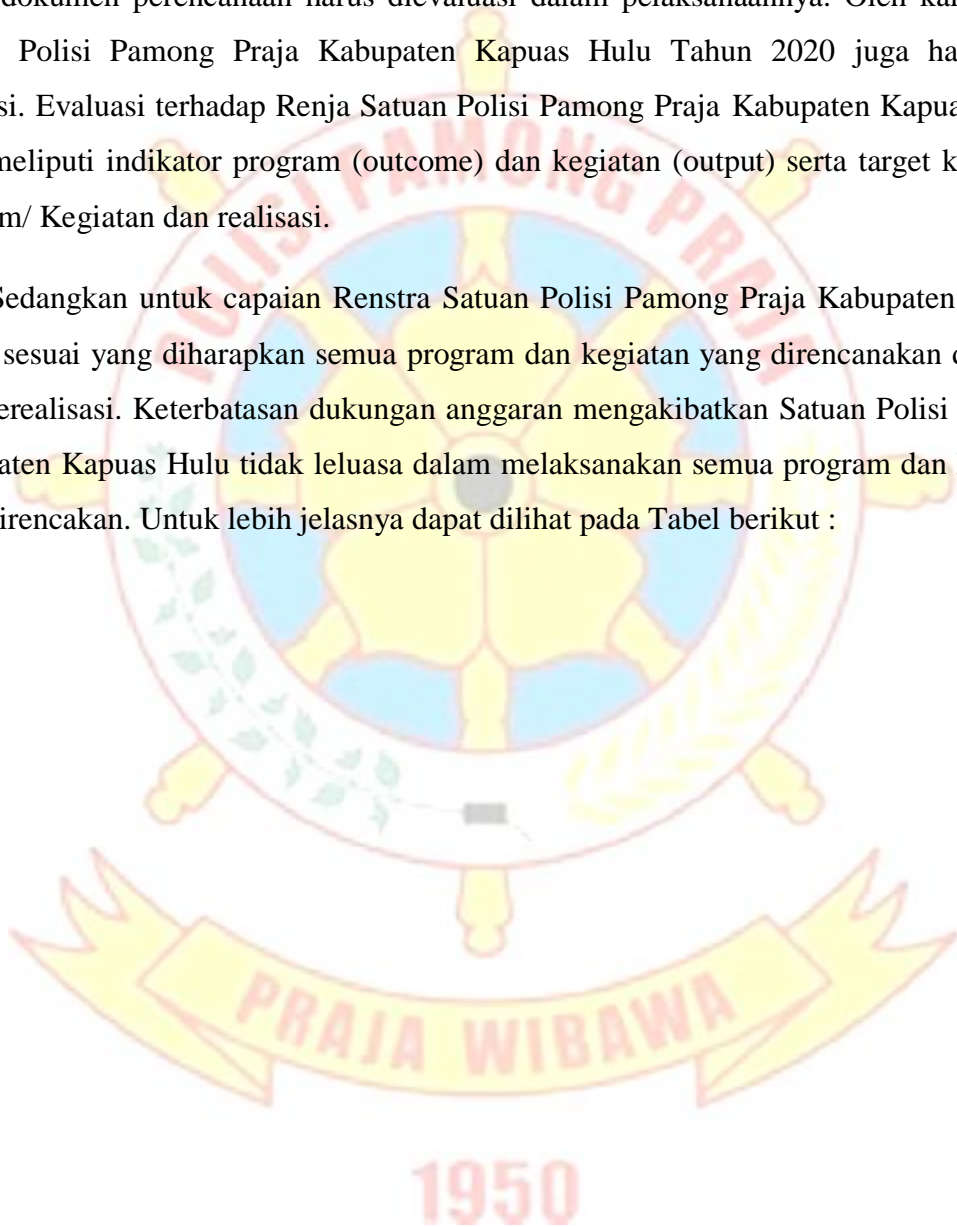
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi.

Sedangkan untuk capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi kinerja hasil program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun/n-1) 2019	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+(9)*	11=(10/4)*	12	
01	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK	90%	99%	98%	98%	100,00	98%	98%	109%	
	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya	95%	0%	95%	100%	105,26	95%	98%	103%	
	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten	95%	46%	56%	56%	100,00	86%	86%	90%	
	06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	95%	95%	100%	105,26	95%	97%	102%	
	20	Peningkatan Kapasitas LINMAS	Persentase Anggota LINMAS terlatih	25%	9%	9%	9%	99%	9%	9%	36%	

16	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	65%	10%	20%	20%	100,00	50%	50%	77%	
19	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas LINMAS	0,98	0,96	0,95	1,11	116,84	0,96	1,01	103%	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator *)	SPM/standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		nasional	(PP-6/2008)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Predikat SAKIP			B	B	B	BB	C	CC	B	BB	
2	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			10%	20%	50%	65%	100%	100%	50%	65%	

3	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	50%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
---	--	-----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	--



2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan perundangn-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian negara dan atau lembaga lainnya.
- d. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Visi Bupati Kapuas Hulu yaitu ***"Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis"***

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih; dan
2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang

maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- a. Terorisme sebagai akibat terbukanya akses dari negara Malaysia maupun dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara;
- b. Isu Primordialisme, Ras dan Keagamaan;
- c. Kebijakan pemerintah pusat yang mengganggu atau menghambat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya misalnya penetapan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berakibat masyarakat dikawasan hutan lindung tersebut tidak dapat mengolah dan mengelola hasil hutan.
- d. Kestabilan suhu politik yang tidak menentu menyebabkan terhambatnya para investor untuk membuka usaha bisnis di Kabupaten Kapuas Hulu.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	95%	4.757.690.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	95%	5.049.459.135	
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	450	2.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	450	2.310.000	
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	46.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	53.046.000	
			Pembayaran Langganan TV Kabel	60				Pembayaran Langganan TV Kabel	5		
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	6	6.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	6	7.140.000	
007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	23	111.180.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	276	117.054.000	
009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	22	11.350.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	22	11.917.500	
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	68	86.102.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	68	90.407.100	
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Dokumen yang dicetak	5	15.495.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Dokumen yang dicetak	5	16.269.750	
			Dokumen yang digandakan	14				Dokumen yang digandakan	14		
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	9	7.513.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	9	7.888.650	
013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	2	15.600.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	14	60.386.235	
014	-	-	-	-	0	Penyediaan peralatan rumah tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	15.802.500	

015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Langganan Koran	3	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Langganan Koran	3	6.300.000	
017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	110	189.150.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	88	196.182.000	
018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	7	413.692.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	7	434.376.600	
019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja	24	394.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja	36	413.700.000	
060	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Apel di Kabupaten	750	222.556.000	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Apel di Kabupaten	750	233.683.800	
		Provinsi Kal-Bar	Jumlah Peserta Apel Tingkat Provinsi	17			Provinsi Kal-Bar	Jumlah Peserta Apel Tingkat Provinsi	17		
		Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Raker	150			Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Raker	150		
061	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Menerima Tunjangan Khusus	3240	3.188.400.000	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Menerima Tunjangan Khusus	3240	3.347.820.000	
062	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	1	37.852.000	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	1	31.395.000	
066	Penyediaan Jasa Publikasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Spanduk yang Disediakan	12	3.600.000	Penyediaan Jasa Publikasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Spanduk yang Disediakan	12	3.780.000	
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi BAIK	95%	748.456.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi BAIK	95%	1.480.862.190	
005	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	3	307.600.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	7	1.027.143.390	
010	Pengadaan Mebeulair	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Mebeulair	20	43.600.000	Pengadaan Mebeulair	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Mebeulair	20	45.780.000	
024	Pemeliharaan Rutin /	Satuan Polisi	Jumlah BBM	16982	213.656.000	Pemeliharaan Rutin /	Satuan Polisi	Jumlah BBM	16.982	224.338.800	

	Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pamong Praja	Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan	22		Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pamong Praja	Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan	22		
			Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan	30				Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan	30		
025	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	1	183.600.000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	1	183.600.000	
03	Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya	95%	127.195.000	Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya	95%	209.055.000	
002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	110	111.100.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	88	185.955.000	
005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	111	16.095.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	88	23.100.000	
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten	95%	982.426.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten	91%	1.179.047.300	
001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	59	787.071.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	59	826.424.550	
028	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	100	53.680.000	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	50	56.364.000	
029	-	-	-	-	0	Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	45	147.500.000	
030	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	32	76.380.000	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	32	80.199.000	

031	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	50	15.275.000	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	50	16.038.750	
032	Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan	Pts Utara & Pts Selatan	Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Penyuluhan	24	50.020.000	Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan	Pts Utara & Pts Selatan	Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Penyuluhan	24	52.521.000	
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	43.628.700	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	27.015.135	
042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	32.717.500	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	17.385.375	
043	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	4.489.200	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	4.713.660	
044	Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	2.960.000	Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	2.199.750	
045	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	3.462.000	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	2.716.350	
16	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	80%	637.486.000	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	65%	694.370.600	
006	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan	22	148.293.000	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan	23	139.663.650	
008	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	5	89.289.000	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	5	87.190.950	

009	-	-	-	-	0	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200	50.845.200	
011	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	4	52.231.000	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	4	53.742.150	
012	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	2	48.273.000	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	2	42.129.150	
013	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	132	299.400.000	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	6	173.880.000	
	-	-	-	-	0	Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Alat-Alat Persenjataan Keamanan	7	100.100.000	
	-	-	-	-	0	Pembuatan Peta Rawan Trantibum	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Daerah Rawan Trantibum	23	46.819.500	
19	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Rasio Petugas LINMAS	0,97	319.170.000	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Rasio Petugas LINMAS	0,97	336.283.500	
002	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Satlinmas yang Direkrut	5	212.970.000	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Satlinmas yang Direkrut	5	223.618.500	
			Jumlah Anggota Satlinmas Aktif	1838				Jumlah Anggota Satlinmas Aktif	1838		
006	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kejadian Bencana	12	33.000.000	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kejadian Bencana	12	34.650.000	
007	Bantuan Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan	10	6.500.000	Bantuan Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan	10	6.825.000	
008	Pembangunan Pos Kamling	Kel. Hilir Kantor, Putussibau Kota, Kel. Kedamin Hulu dan Kedamin Hilir	Jumlah Pos Kamling yang dibangun	4	60.000.000	Pembangunan Pos Kamling	Kel. Hilir Kantor, Putussibau Kota, Kel. Kedamin Hulu	Jumlah Pos Kamling yang dibangun	4	64.155.000	

							dan Kedamin Hilir				
009	Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Serta Satlinmas se Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi	1	6.700.000	Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Serta Satlinmas se Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi	1	7.035.000	
20	Peningkatan Kapasitas LINMAS		Persentase Anggota LINMAS terlatih	95%	172.775.000	Peningkatan Kapasitas LINMAS		Persentase Anggota LINMAS terlatih	17%	181.413.750	
001	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	44	157.675.000	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	39	165.558.750	
002	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Putussibau	Jumlah Peserta Penyuluhan	100	15.100.000	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Putussibau	Jumlah Peserta Penyuluhan	100	15.855.000	
<u>TOTAL</u>					<u>7.788.826.700</u>	-			<u>9.157.506.610</u>		

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang mana terdapat beberapa usulan terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

No	Program /Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (%)	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ibukota Provinsi dan Pemerintah Pusat	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	95%	
	2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab. Kapuas Hulu		95%	
	3	Penyediaan Jasa Publikasi	Kab. Kapuas Hulu		95%	
	4	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Satpol PP		95%	
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satpol PP	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK	95%	
III	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					
	1	Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	95%	
	2	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Kab. Kapuas Hulu		95%	
	3	Pengawasan , Pengendalian dan Penertiban Kantratibmas	Kab. Kapuas Hulu		95%	
	4	Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kapuas Hulu		95%	
	5	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Kab. Kapuas Hulu		95%	
	6	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Kab. Kapuas Hulu		95%	
IV	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					
	1	Mobilisasi dan pendataan satuan perlindungan masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	Rasio Petugas	95%	
	2	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Kab. Kapuas Hulu		95%	

	3	Bantuan Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Kab. Kapuas Hulu	LINMAS	95%	
	4	Pembangunan Pos Kamling	Putussibau		95%	
V	Peningkatan Kapasitas LINMAS					
	1	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Anggota LINMAS terlatih	95%	
	2.	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Putussibau		95%	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu

sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 sesuai dengan Renstra adalah :

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik;
- b. Mantapnya ketenteraman dan ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif;

Adapun sasaran dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah :

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP ;
- b. Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2020
1	2	3	4	8
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	BB
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	65%
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 8 program.

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Satpol PP secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 5 program yaitu:

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum
- Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya
- Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD
- Penyediaan Jasa Publikasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Pengadaan Mebeulair
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Kesamaptaaan Polisi Pamong Praja
- Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja
- Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD
- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
- Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP)

Sasaran 2 : Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan persentase penegakan perda dan perkara secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 3 program yaitu

1. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantarntibmas
 - Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA
 - Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda
 - Pengawasan Pedagang Kaki Lima
 - Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah
 - Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan
 - Pembuatan Peta Rawan Trantibum
2. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat
 - Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran
 - Bantuan Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
 - Pembangunan Pos Kamling
 - Rapat Koordinasi Peran Seta Satlinmas se Kabupaten Kapuas Hulu
3. Peningkatan Kapasitas Linmas
 - Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
 - Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tabel 3. 2 Program/ Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2019	Satuan	2020		2021		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Target		Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP			Predikat SAKIP	B		BB		BB		SATPOL PP
				Predikat SAKIP	B		BB		BB		SATPOL PP
		01	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%		95%	5.049.459.135	95%	5.301.932.092	Sekretariat
		001	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	450	Lbr	450	2.310.000	450	2.425.500	Sekretariat
		002	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	Bln	12	53.046.000	12	55.698.300	Sekretariat
			c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Pembayaran Langganan TV Kabel	5	Jaringan	5		5		
		006		Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	6	Unit	6	7.140.000	6	7.497.000	Sekretariat

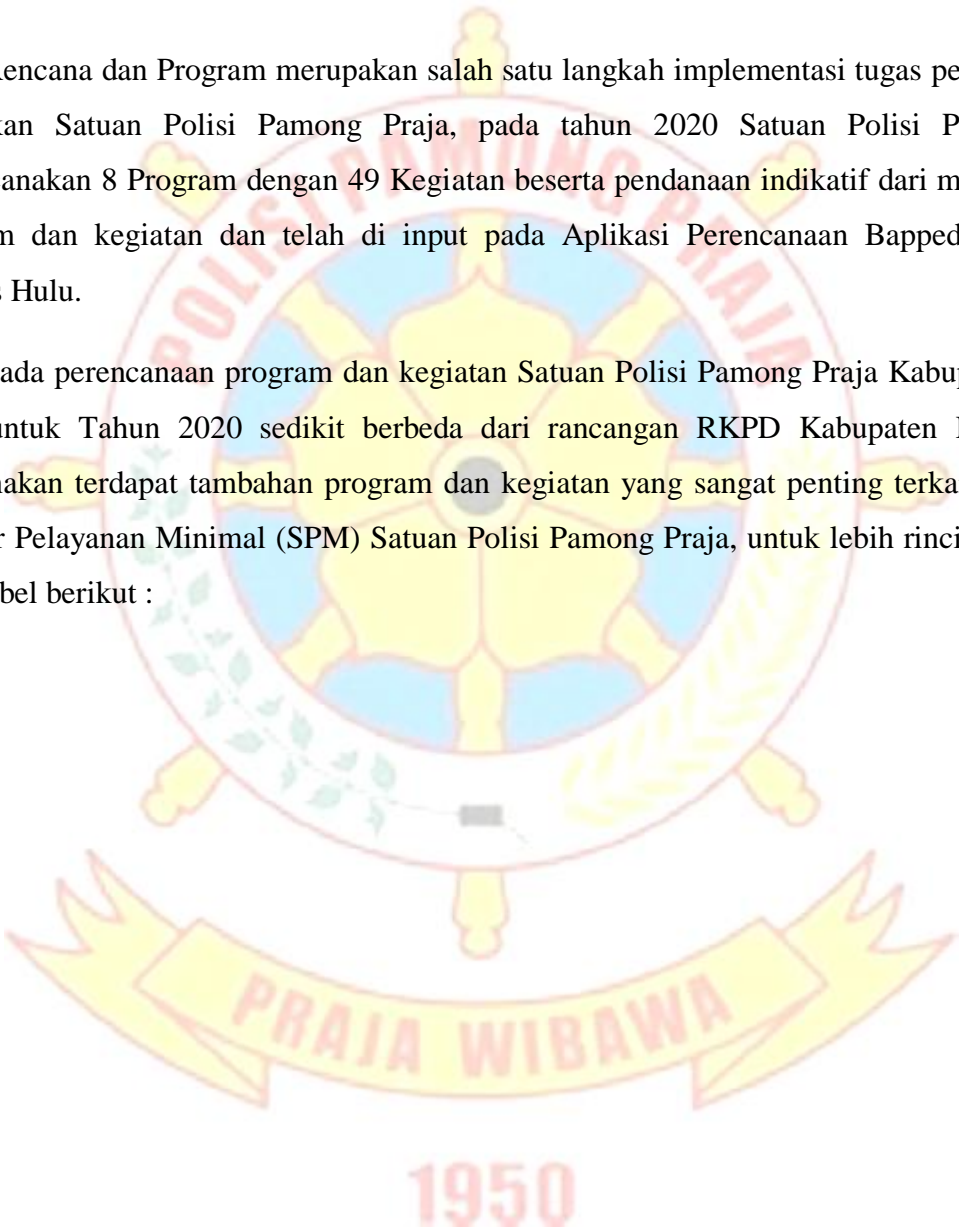
		Kendaraan Dinas/ Operasional								
007	d	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	160	OB	276	117.054.000	276	122.906.700	Sekretariat
009	e	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	27	Unit	22	11.917.500	22	12.513.375	Sekretariat
010	f	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	68	Jenis	68	90.407.100	68	94.927.455	Sekretariat
011	g	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak	5	Dok.	5	16.269.750	5	17.083.238	Sekretariat
			Dokumen yang digandakan	14	Dok.	14		14		
012	h	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	10	Jenis	9	7.888.650	9	8.283.083	Sekretariat
013	i	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	0	Unit	14	60.386.235	14	63.405.547	Sekretariat
014	j	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	Unit	6	15.802.500	6	16.592.625	Sekretariat
015	k	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Langganan Koran	3	Editor	3	6.300.000	3	6.615.000	Sekretariat
017	l	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	88	Orang	88	196.182.000	88	205.991.100	Sekretariat
018	m	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	4	Kegiat an	7	434.376.600	7	456.095.430	Sekretariat
019	n	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja	32	Kegiat an	36	413.700.000	36	434.385.000	Sekretariat
060	o	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Jumlah Peserta Apel di Kabupaten	0	Org	750	233.683.800	750	245.367.990	Sekretariat
			Jumlah Peserta Apel Tingkat Provinsi	14	Org	17		17		
			Jumlah Peserta Raker	0	Org	150		150		
061	p	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya	Jumlah Aparatur yang Menerima Tunjangan Khusus	3.096	OB	3.240	3.347.820.000	3.240	3.515.211.000	Sekretariat
062	q	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	1	Web	1	31.395.000	1	32.964.750	Sekretariat
066	r	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Spanduk yang Disediakan	12	Buah	12	3.780.000	12	3.969.000	Sekretariat
02	2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK	95%		95%	1.480.862.190	95%	1.554.905.300	
005	a.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0	Unit	7	1.027.143.390	7	1.078.500.560	Sekretariat
010	b.	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Pengadaan Mebeulair	0	Buah	20	45.780.000	20	48.069.000	Sekretariat
024	c.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah BBM	16967	Liter	16.982	224.338.800	16.982	235.555.740	Sekretariat
			Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan	26	Keg	22		22		
			Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan	24	Jenis	30		30		
035	d	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	0	Unit	1	183.600.000	1	192.780.000	Sekretariat
03	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya	95%		95%	209.055.000	95%	219.507.750	
002	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	0	Stel	88	185.955.000	88	195.252.750	Sekretariat
005	b	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	0	Stel	88	23.100.000	88	24.255.000	Sekretariat
05	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten	86%		91%	1.179.047.300	95%	1.237.999.665	
001	a	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2	Org	59	826.424.550	59	867.745.778	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil
028	b	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	50	Org	50	56.364.000	50	59.182.200	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil
029	c	Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	0	Org	45	147.500.000	45	154.875.000	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil
030	d	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	32	Org	32	80.199.000	32	84.208.950	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil
	e	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	0	Org	50	16.038.750	50	16.840.688	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil

			Kenyamanan Lingkungan								
		f	Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan	Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Penyuluhan	0	Org	24	52.521.000	24	55.147.050	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil
06	5		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%		95%	27.015.135	95%	28.365.892	
	a		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	0	Dok.	1	17.385.375	1	18.254.644	Sekretariat
	b		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	0	Dok.	1	4.713.660	1	4.949.343	Sekretariat
	c		Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	0	Dok.	1	2.199.750	1	2.309.738	Sekretariat
	d		Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	0	Dok.	1	2.716.350	1	2.852.168	Sekretariat
Mantapnya a Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif				Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%		100%		100%		
				Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	50%		65%		65%		
				Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%		100%		100%		
	16	6	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	50%		65%	694.370.600	65%	729.089.130	
	006	a	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Jumlah Kegiatan Pengamanan	22	Keg	22	139.663.650	22	146.646.833	Bid. Penegakan dan Operasi
	008	b	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	0	Kasus	5	87.190.950	5	91.550.498	Bid. Penegakan dan Operasi
	009	c	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	Org	200	50.845.200	200	53.387.460	Bid. Penegakan dan Operasi
	011	d	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	0	Kasus	4	53.742.150	4	56.429.258	Bid. Penegakan dan Operasi
	012	e	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	0	Keg	2	42.129.150	2	44.235.608	Bid. Penegakan dan Operasi
	013	f	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	8	Keg	6	173.880.000	6	182.574.000	Bid. Penegakan dan Operasi
		g	Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	Jumlah Pengadaan Alat-Alat Persenjataan Keamanan	0	Buah	7	100.100.000	7	105.105.000	Sekretariat
		h	Pembuatan Peta Rawan Trantibum	Jumlah Daerah Rawan Trantibum	0	Kec	23	46.819.500	23	49.160.475	Bid. Penegakan dan Operasi
	19	7	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas LINMAS	0,95		0,97	336.283.500	0,98	353.097.675	
	002	a.	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang Direkrut	0	Org	5	223.618.500	5	234.799.425	Bid. Perelindungan Masyarakat
				Jumlah Anggota Satlinmas Aktif	0	Org	1.838		1.838		
	006	b	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Jumlah Kejadian Bencana	6	Kej.	12	34.650.000	12	36.382.500	Bid. Perelindungan Masyarakat
	007	c	Bantuan Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pengamanan	0	Keg	10	6.825.000	10	7.166.250	Bid. Perelindungan Masyarakat
	008	d	Pembangunan Pos Kamling	Jumlah Pos Kamling yang dibangun	0	Unit	4	64.155.000	4	67.362.750	Sekretariat
	009	e	Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Serta Satlinmas se Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi	1	Keg	1	7.035.000	1	7.386.750	Bid. Perelindungan Masyarakat

	20	8	Peningkatan Kapasitas LINMAS	Persentase Anggota LINMAS terlatih	9%	%	17%	181.413.750	25%	190.484.438	
	001	a	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	0	Org	39	165.558.750	39	173.836.688	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil
	002	b	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Penyuluhan	0	Org	100	15.855.000	100	16.647.750	Bid. Perelindungan Masyarakat
-	-	-	-	-	-	TOTAL		2.157.506.610		2.615.381.941	-

Rencana dan Program merupakan salah satu langkah implementasi tugas pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, pada tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 8 Program dengan 49 Kegiatan beserta pendanaan indikatif dari masing-masing program dan kegiatan dan telah di input pada Aplikasi Perencanaan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada perencanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun 2020 sedikit berbeda dari rancangan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu dikarenakan terdapat tambahan program dan kegiatan yang sangat penting terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat								
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		95%	5.049.459.135			95%	5.301.932.092
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangkat yang dibeli	Satuan Polisi Pamong Praja	450	2.310.000	APBD		450	2.425.500
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	12	53.046.000	APBD		12	55.698.300
		Pembayaran Langganan TV Kabel		5		APBD		5	
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	Satuan Polisi Pamong Praja	6	7.140.000	APBD		6	7.497.000
007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	276	117.054.000	APBD		276	122.906.700
009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	Satuan Polisi Pamong Praja	22	11.917.500	APBD		22	12.513.375
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	Satuan Polisi Pamong Praja	68	90.407.100	APBD		68	94.927.455
011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak	Satuan Polisi Pamong Praja	5	16.269.750	APBD		5	17.083.238
		Dokumen yang digandakan		14				14	
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	9	7.888.650	APBD		9	8.283.083
013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	Satuan Polisi Pamong Praja	14	60.386.235	APBD		14	63.405.547
014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Satuan Polisi Pamong Praja	6	15.802.500	APBD		6	16.592.625
015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Langganan Koran	Satuan Polisi Pamong Praja	3	6.300.000	APBD		3	6.615.000
017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	Satuan Polisi Pamong Praja	88	196.182.000	APBD		88	205.991.100
018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	7	434.376.600	APBD		7	456.095.430
019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	36	413.700.000	APBD		36	434.385.000
060	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Jumlah Peserta Apel di Kabupaten	Kabupaten Kapuas Hulu	750	233.683.800	APBD		750	245.367.990
		Jumlah Peserta Apel Tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan Barat	17				17	
		Jumlah Peserta Raker	Kabupaten Kapuas Hulu	150				150	
061	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya	Jumlah Aparatur yang Menerima Tunjangan Khusus	Satuan Polisi Pamong Praja	3.240	3.347.820.000	APBD		3.240	3.515.211.000
062	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	Satuan Polisi Pamong Praja	1	31.395.000	APBD		1	32.964.750
066	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Spanduk yang Disediakan	Satuan Polisi Pamong Praja	12	3.780.000	APBD		12	3.969.000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK		95%	1.480.862.190	APBD		90%	1.554.905.300
005	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Satuan Polisi Pamong Praja	7	1.027.143.390	APBD		7	1.078.500.560
010	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Pengadaan Mebeulair	Satuan Polisi Pamong Praja	20	45.780.000	APBD		20	48.069.000
024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan	Jumlah BBM	Satuan Polisi Pamong Praja	16.982	224.338.800	APBD		16.982	235.555.740

	Dinas Operasional	Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan		22		APBD		22	
		Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan		30		APBD		30	
025	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	Satuan Polisi Pamong Praja	1	183.600.000	APBD		1	192.780.000
03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya		95%	209.055.000	APBD		95%	219.507.750
002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Satuan Polisi Pamong Praja	88	185.955.000	APBD		88	195.252.750
005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	Satuan Polisi Pamong Praja	88	23.100.000	APBD		88	24.255.000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten		91%	1.179.047.300	APBD		95%	1.237.999.665
001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	59	826.424.550	APBD		59	867.745.778
028	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	Satuan Polisi Pamong Praja	50	56.364.000	APBD		50	59.182.200
029	Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	Kabupaten Kapuas Hulu	45	147.500.000	APBD		45	154.875.000
030	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	Satuan Polisi Pamong Praja	32	80.199.000	APBD		32	84.208.950
031	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	Satuan Polisi Pamong Praja	50	16.038.750	APBD		50	16.840.688
032	Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan	Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Penyuluhan	Pts Utara & Pts Selatan	24	52.521.000	APBD		24	55.147.050
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		95%	27.015.135	APBD		95%	28.365.892
042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Satuan Polisi Pamong Praja	1	17.385.375	APBD		1	18.254.644
043	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Satuan Polisi Pamong Praja	1	4.713.660	APBD		1	4.949.343
044	Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2.199.750	APBD		1	2.309.738
045	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2.716.350	APBD		1	2.852.168
16	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda		65%	694.370.600	APBD		65%	729.089.130
006	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Jumlah Kegiatan Pengamanan	Kabupaten Kapuas Hulu	23	139.663.650	APBD		23	146.646.833
008	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	Kabupaten Kapuas Hulu	5	87.190.950	APBD		5	91.550.498
009	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Kapuas Hulu	200	50.845.200	APBD		200	53.387.460
011	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	Kabupaten Kapuas Hulu	4	53.742.150	APBD		4	56.429.258
012	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	Kabupaten Kapuas Hulu	2	42.129.150	APBD		2	44.235.608
013	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat	Kabupaten Kapuas Hulu	6	173.880.000	APBD		6	182.574.000

		Pemda, Provinsi dan Pusat							
	Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	Jumlah Pengadaan Alat-Alat Persenjataan Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja	7	100.100.000	APBD		7	105.105.000
	Pembuatan Peta Rawan Trantibum	Jumlah Daerah Rawan Trantibum	Kabupaten Kapuas Hulu	23	46.819.500	APBD		23	49.160.475
19	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas LINMAS		0,97	336.283.500	APBD		0,98	353.097.675
002	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang Direkrut	Kabupaten Kapuas Hulu	5	223.618.500	APBD		5	234.799.425
		Jumlah Anggota Satlinmas Aktif		1.838		APBD		1.838	
006	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Jumlah Kejadian Bencana	Kabupaten Kapuas Hulu	12	34.650.000	APBD		12	36.382.500
007	Bantuan Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pengamanan	Kabupaten Kapuas Hulu	10	6.825.000	APBD		10	7.166.250
008	Pembangunan Pos Kamling	Jumlah Pos Kamling yang dibangun	Kel. Hilir Kantor, Putussibau Kota, Kel. Kedamin Hulu dan Kedamin Hilir	4	64.155.000	APBD		4	67.362.750
009	Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Serta Satlinmas se Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi	Putussibau	1	7.035.000	APBD		1	7.386.750
20	Peningkatan Kapasitas LINMAS	Persentase Anggota LINMAS terlatih		17%	181.413.750	APBD		25%	190.484.438
001	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	Kabupaten Kapuas Hulu	39	165.558.750	APBD		39	173.836.688
002	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Penyuluhan	Putussibau	100	15.855.000	APBD		100	16.647.750
TOTAL					9.157.506.610	-	-		9.615.381.941

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Juni 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

